

**PERSEPSI PETANI TERHADAP KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK
DI DESA MISKIN KABUPATEN BLORA**
(Farmers' Perception on Fertilizer Subsidy Policy in Poor Village of Blora District)

Abdul Choliq, Agus Hermawan, dan Rusmaji
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah

ABSTRACT

Economic crisis forced Indonesia to ask IMF support. As a consequences, several policies which was not popular had to be taken. In 1998, fertilizer subsidy was with drawn. The policy was expected to have positive impact both on their supply and their prices in farmers' level due to the healthy competitive market. However, the impacts of the policy were the price increasing of fertilizers and cost production as well as the flooding of lower prices imported commodities. Aside of farmers' term of trade were lowered, farms' productivity were also decreasing. Cut off Indonesia and IMF relationship made possible for the government to resubsidize the fertilizers since in the end of 2003. Hopefully the policy will encourage farmers to intensify their farming due to the lower cost of production. To find out farmers' perception on the resubsidy policy, survey was carried out in Blora District in Agustus – Nopember 2005. Results showed that since farmers pay the fertilizer in cash, the subsidy withdrawal added their burden. Respondents stated that in the last five years, fertilizers' prices tended to increase. Most respondents hope that urea prices is not more than Rp1.050,-/kg to make them do not loss money in paddy farming. Only part of farmers stated that urea price should range from Rp1.100,- to Rp1.200,-/kg. Unfortunately, most of them (43.95%) stated that less information from the agricultural extension workers caused around 41.12% of respondent did not know the fertilizer subsidy policy. Farmers were also not fully realize the policy. As much as 22.42% of respondents stated that the fertilizer price was not differ, while 31.77% of them stated that the price even higher compare to the condition before the policy. The result of survey showed that field extension workers (*Penyuluh Pertanian Lapangan*) still have significant role as a source of information either in agricultural innovation or government policies. However, repositioning of their job description need to be developed further.

Key words: *farmers perception, fertilizer subsidy, poor villages*

PENDAHULUAN

Dengan masuknya lembaga donor *International Monetary Fund* (IMF), berbagai kebijakan pemerintah harus diambil, meskipun tidak selalu berpihak pada petani. Pada Desember 1998, subsidi pupuk yang selama ini dinikmati petani dicabut. Secara makro

kebijakan penghapusan subsidi pupuk adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pembangunan. Pencabutan subsidi pupuk berakibat harganya naik, kondisi ini diharapkan dapat menjadi pendorong petani agar menggunakan pupuk lebih efisien (Darmawan, *et al.* 1995 disitasi Darwis dan

Nurmanaf 2004). Adanya penggunaan pupuk yang efisien akan menjanjikan keuntungan bagi petani dan berpeluang untuk membiayai input usahatani, serta meningkatkan daya saing (Dillon dan Hardakar. 1980; Hadi *et al.*, 1997).

Kebijakan pencabutan subsidi pupuk berdampak positif bagi ketersediaan dan harga pupuk di tingkat petani, karena terjadinya persaingan sehat antar pelaku bisnis pupuk (Sudaryanto, 2001 disitasi Darwis dan Nurmanaf 2004). Namun dampak positif ini tidak berlangsung lama, karena Darwis dan Nurmanaf (2004) menyebutkan (1) harga pupuk KCL dan ZA naik mengikuti harga di pasar internasional dan pergerakan nilai tukar rupiah, (2) muncul beberapa pupuk alternatif yang kualitasnya belum terjamin, (3) munculnya pasar oligopolistik, yakni distributor bermodal kuat bebas menyalurkan pupuk ke luar wilayah kerjanya, dan (4) pupuk urea sulit diperoleh. Adnyana dan Kariyasa (2000) menyebutkan adanya Liberalisasi perdagangan dan pencabutan subsidi pupuk, menyebabkan biaya usahatani meningkat dan petani harus bersaing dengan komoditi yang sama dari luar negeri dengan harga relatif lebih murah. Akibatnya, indeks harga yang diterima petani lebih rendah dari pada yang dibayar atau Nilai Tukar Petani (NTP) menurun (Maryadi, 2002), dan berdampak pada produktivitas petani menurun, sehingga dapat berimplikasi pada kerapuhan ketahanan pangan.

Dalam kurun tahun 1999-2003 (BPS Kabupaten Blora, 2004) rata-rata produksi dan luas panen padi di Kabupaten Blora mengalami penurunan masing-masing sebesar -1,59% dan -2,37% per tahun. Fenomena ini bila terjadi di banyak daerah dapat menyebabkan permasalahan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai akibat kekurangan energi dan protein (Soekirman, 2002 disitasi Gatoet, 2003).

Pasca pemutusan dengan IMF, pemerintah

mencoba membantu petani melalui pemberian kembali subsidi pupuk. Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi pada sektor pertanian tahun anggaran 2005 dituangkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005 tanggal 3 Maret 2005. Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yaitu urea Rp1.050,-/kg, ZA Rp950,-/kg, SP-36 Rp1.400,-/kg, dan NPK Rp1.600,-/kg. Namun demikian, kebijakan pemberian subsidi pupuk belum sepenuhnya dirasakan petani (Kariyasa *et al.*, 2004). Pada saat petani membutuhkan seringkali kesulitan memperoleh pupuk bahkan dengan harga yang lebih mahal dari ketentuan yang ada. Dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah yang pro petani, maka survei dilakukan untuk mengetahui persepsi petani terhadap upaya pemerintah dalam memberdayakan petani melalui kebijakan pemberian kembali subsidi pupuk di Kabupaten Blora.

BAHAN DAN METODA

Kegiatan survei dilakukan pada bulan Agustus – Nopember 2005. Untuk mendapatkan lokasi yang dapat menggambarkan kondisi daerah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Blora. Lokasi yang dipilih untuk mendapatkan data dan informasi sebanyak 5 desa sentra padi yakni Kentong (Kecamatan Cepu), Gempolrejo dan Kedungrejo (Kecamatan Tunjungan), Tempuran (Kecamatan Blora), dan Sidomulyo (Kecamatan Banjarejo). Jumlah petani padi seluruhnya 107 orang, dengan jumlah masing-masing desa 30, 28, 6, 20, dan 23 responden.

Dengan berbagai pertimbangan seperti tingkat pendapatan dan luas kepemilikan lahan petani, maka desa-desa tersebut termasuk desa miskin. Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan pendapatan petani miskin, telah dialokasikan dana dari Asian Development Bank

(ADB) yang tergabung dalam kegiatan Poor Farmer Income Improvement through Inovation Programe (PFI3P) atau Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi (P4MI). Sebagai dasar pertimbangan adalah kepemilikan lahan pertanian produktif kurang dari 0,1 ha dan secara umum hanya untuk usaha tanaman pokok, serta pendapatan petani di desa tersebut kurang dari Rp.1.000.000 per kapita per tahun (Anonim, 2003). Persyaratan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Sayogyo disitasi Collier *et al.*, 1996, petani dikatakan miskin bila pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok, dan hidup sehat per orang per tahun di bawah 320 kilogram nilai tukar beras.

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan petani responden, antara lain karakteristik petani responden, harga pupuk, dan persepsi petani dengan adanya kebijakan pemerintah memberi subsidi pupuk. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain data deret waktu (time series) produksi dan luas panen serta perkembangan harga pupuk, diperoleh dari instansi terkait (BPS dan Dinas terkait). Data dianalisis secara statistik sederhana (Steel & Torrie, 1981) dan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum petani responden

Petani yang dijadikan responden adalah yang berusahatani padi, dengan gambaran umum karakteristiknya disajikan pada Tabel 1. Persentase tertinggi umur responden berkisar 36 – 45 tahun, sedangkan responden kurang dari 25 tahun lebih sedikit dibanding responden berumur lebih dari 55 tahun. Dengan mengacu usia non produktif lebih dari 55 tahun, maka sebagian besar responden dalam usia produktif. Petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya bilamana ada inovasi teknologi, apalagi kalau kebijakan pemerintah mendukung

usahatani. Meskipun yang disebutkan Hermawan, *et al.*, (2005), keluarga tani yang masih muda cenderung bekerja di luar daerahnya dan pada sektor non pertanian, tidak terlalu mempengaruhi kondisi usahatani yang ada di lokasi kegiatan.

Tabel 1. Karakteristik rata-rata seluruh responden

Uraian	Frekuensi	Persen
Responden	107	100
Umur KK petani		
a. < 25 thn	2	1,87
b. 25 – 35 thn	25	23,36
c. 36 – 45 thn	44	41,12
d. 46 – 55 thn	23	21,50
e. > 55 thn	13	12,15
Pengalaman aktif		
a. < 5 thn	16	14,95
b. 5 – 10 thn	32	29,91
c. > 10 thn	59	55,14
Pendidikan formal		
a. Tdk tamat SD	26	24,30
b. Tamat SD	44	41,12
c. SLTP	17	15,89
d. SLTA	19	17,76
e. Perguruan tinggi	1	0,93
Pendidikan non formal		
a. Tidak pernah	67	62,62
b. Non pertanian	18	16,82
c. Pertanian	22	20,56

Pengalaman responden dalam berusahatani padi sebagian besar lebih dari 10 tahun (55,14%). Melihat pengalaman petani responden dalam berusahatani padi, sangat menunjang dalam memberikan kontribusi wilayahnya sebagai salah satu sentra produksi padi. Namun, pengalaman yang memadai dalam berusahatani padi ini kurang didukung dengan tingkat pendidikan responden. Pendidikan responden

sebagian besar (41,12%) tamatan SD dan tidak tamat SD (24,3%). Sebagian besar responden (62,62%) tidak pernah mengikuti pendidikan non formal. Pendidikan non formal bidang pertanian diikuti 20,56% responden dan sisanya mengikuti bidang non pertanian (16,82%). Kondisi petani yang ada kurang mendukung dalam penyerapan inovasi teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitasnya, karena petani yang tingkat pendidikan relatif tinggi cenderung lebih cepat mempertimbangkan dan menerapkan teknologi yang diperkenalkan (Bagyo dan Rahmanto 1995).

Aset lahan pertanian yang dikuasai responden sebagian besar lahan tadah hujan (Tabel 2). Bila dilihat penguasaan luas lahan garapan, sebagian besar responden termasuk petani gurem. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2003) menyebutkan rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar.

Tabel 2. Keragaan penguasaan aset pertanian petani responden

Uraian	Frekuensi	Persen
Responden	107	100
Lahan garapan :		
a. sawah		
1. < 0,5 ha	4	3,74
2. 0,51 – 1,00 ha	5	4,67
3. > 1,00 ha	8	7,48
b. tadah hujan		
1. < 0,5 ha	48	44,86
2. 0,51 – 1,00 ha	17	15,89
3. > 1,00 ha	15	14,02
c. tegalan		
1. < 0,5 ha	37	34,58
2. 0,51 – 1,00 ha	10	9,34
3. > 1,00 ha	-	-
Alat pertanian		
a. Sprayer	44	41,12
b. Trasher	17	15,89

Uraian	Frekuensi	Persen
c. Lantai jemur	4	3,74
d. Traktor	1	0,93
e. Rice mill	1	0,93
f. Diesel	1	0,93
g. Tidak punya	39	36,45
Ternak ruminansia		
a. Sapi	65	60,75
b. Kambing/ domba	8	7,48
c. Kerbau	-	-
d. Tidak memiliki	34	31,77

Jumlah responden yang memiliki alat mesin (alsin) pertanian sebesar 63,55% dengan kepemilikan dari hanya satu macam alsin sampai berbagai alsin, sisanya (36,45%) tidak mempunyai alsin sama sekali. Alat mesin pertanian yang paling banyak dimiliki responden adalah sprayer (41,12%) dan trasher (15,89%). Sebagian besar responden (60,75%) memiliki ternak ruminansia besar yaitu sapi. Memelihara sapi merupakan salah satu sumber penghasilan yang cukup penting bagi petani di Blora, baik sebagai pemilik maupun penggaduh. Hermawan *et al.*, (2006) menyebutkan bahwa meskipun kepemilikan ternak dengan skala yang terbatas, sangat membantu dalam menambah pendapatan rumah tangga, dapat difungsikan sebagai tenaga kerja dan penghasil pupuk kandang.

Perkembangan luas panen dan produksi padi

Luas panen padi lima tahun terakhir (1999-2003) di Jawa Tengah mengalami penurunan (BPS Jawa Tengah, 2004). Luas panen padi pada 1999 sebesar 1.688.950 hektar turun menjadi 1.535.625 hektar pada tahun 2003 atau dengan laju penurunan sebesar -1,81%. Pada kurun waktu yang sama produksi padi di Jawa Tengah mengalami penurunan, dari 8.345.854

ton (1999) turun menjadi 8.123.839 ton pada tahun 2003 atau dengan laju penurunan sebesar - 0,53%. Keadaan yang cenderung sama terjadi pada empat kecamatan di kabupaten Blora (Tabel 3 dan 4).

Tabel 3. Perkembangan luas panen padi (ha) pada empat kecamatan di Kab. Blora (1995-2004)

Tahun	Luas panen (ha)			
	Kec.Banjarejo	Kec. Blora	Kec.Cepu	Kec.Tunjungan
1995	3785	4734	3048	4680
1996	4046	4521	3159	5219
1997	3840	4530	3718	4024
1998	3979	4538	3490	4420
1999	4273	4411	3386	4523
2000	3859	4350	4112	4286
2001	3922	4199	2208	3454
2002	4037	4270	3968	3016
2003	3041	3456	3525	3480
2004	4401	4579	3617	4337

Tabel 4. Perkembangan produksi padi (ton) pada empat kecamatan di Kab.Blora (1995-2004)

Tahun	Luas panen (ha)			
	Kec.Banjarejo	Kec. Blora	Kec.Cepu	Kec.Tunjungan
1995	19663	24839	16017	24921
1996	19450	22596	17402	25829
1997	18767	21794	19311	19966
1998	19577	21874	18637	22630
1999	21074	20806	16841	28698
2000	20734	22807	22702	22416
2001	20480	24314	12773	18793
2002	20373	21806	20814	14325
2003	14273	16780	18483	16382
2004	22479	24108	19657	22387

Perkembangan luas panen maupun produksi padi dari tahun 1995 ke tahun 1998 memperlihatkan kecenderungan naik. Keadaan yang sebaliknya pada pasca 1998 sampai 2003 yang cenderung turun. Kondisi ini diduga sebagai dampak adanya kebijakan Desember 1998 yakni pencabutan subsidi pupuk, karena harga pupuk naik dan sulit diperoleh, banyak pupuk alternatif beredar yang kualitasnya belum terjamin (Adnyana dan Kariyasa, 2000; Darwis dan Nurmanaf, 2004). Adanya pencabutan subsidi pupuk menyebabkan biaya usahatani padi meningkat, sehingga mengurangi

motivasi petani dalam berusahatani padi. Peningkatan luas panen dan produksi padi pada tahun 2004 di duga sebagai efek positif adanya kebijakan berlakunya kembali subsidi pupuk dan INPRES 2001 yang mengatur harga gabah/beras pembelian pemerintah (HPP).

Perkembangan harga dan penggunaan pupuk

Penggunaan pupuk dalam berusahatani oleh responden sangat bervariasi. Jenis dan dosis pupuk yang digunakan sangat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain modal, kebiasaan, serta kemudahan responden untuk mendapatkannya. Jenis pupuk yang dibutuhkan oleh responden pada usahatani padi serta cara mendapatkannya disajikan pada Tabel 5.

Tabel. 5. Jenis pupuk yang dibutuhkan dan cara mendapatkannya

Uraian	Frekuensi	persen
Responden	107	100
Pupuk yang paling dibutuhkan petani :		
a. Urea	106	99,06
b. SP-36	104	97,20
c. KCl	19	17,76
d. Pupuk kandang	42	39,25
Cara mendapatkan		
a. Membeli tunai	99	92,52
b. Hutang	8	7,48
c. Pinjam pada kelompok lain	-	-

Tabel 5 menunjukkan bahwa pupuk urea dan SP-36 sangat dibutuhkan hampir semua responden dalam berusahatani padi. Responden yang menggunakan pupuk kandang cukup tinggi (39,25%). Hal ini disebabkan karena lahan garapan responden sebagian besar berupa lahan tadah hujan dan tegalan. Selain itu kepemilikan ternak ruminansia yaitu sapi sesuai Tabel 2 sangat membantu dalam penyediaan pupuk kandang.

Sebagian besar responden mendapatkan pupuk dengan cara membeli tunai di toko, hanya sebagian kecil dengan hutang yang akan dibayar setelah panen. Peran kelompok tani dalam penyediaan saprodi, khususnya pupuk belum nampak. Kondisi tersebut menyebabkan naiknya harga pupuk dan sangat mempengaruhi sikap petani terhadap pemakaian pupuk (Darwis dan Nurmanaf, 2004), karena harus

menyediakan modal tunai yang lebih banyak.

Adanya kebijakan Desember 1998, menurut Darwis dan Nurmanaf, (2004) menyebabkan harga pupuk mengalami peningkatan yang signifikan, karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan lewat subsidi. Harga eceran urea, SP-36, KCl, dan ZA masing-masing mencapai Rp1.100,-/kg, Rp1.600,-/kg, Rp1.800,-/kg dan Rp1.100/kg. Selanjutnya disebutkan bahwa harga urea mencapai Rp1.370,-/kg pada musim tanam tahun 2002. Peningkatan harga pupuk bukan karena kurangnya pasokan pupuk atau turunnya nilai tukar rupiah, tetapi disebabkan oleh distribusi pupuk yang tidak normal (Sinar Tani, 2004).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blora melaporkan harga pupuk dari

tahun 2002 sampai dengan Nopember tahun 2005 tidak memperlihatkan perubahan harga yang signifikan. Harga pupuk SP-36 selama 2002 – 2004 tidak mengalami perubahan yakni Rp1.600,/kg, dan mengalami kenaikan sejak Januari 2005 menjadi Rp1.800,-/kg. Selama kurun waktu yang sama harga pupuk urea stabil yakni Rp1.200,-/kg, hanya mengalami kenaikan pada Juni dan Juli 2002 menjadi Rp1.300,/kg dan Rp1.240,-/kg, serta pada Desember 2003 menjadi Rp1.230,-/kg. Harga pupuk ZA selama 4 tahun cenderung turun dari sekitar Rp1.200/kg menjadi sekitar Rp1.100,/kg. Perubahan harga yang tajam adalah pupuk KCl, dari harga sekitar Rp1.800 – Rp1.900,-/kg meningkat menjadi Rp2.400,-/kg pada tahun 2005, hal ini disebabkan karena sebagian pupuk KCl diimpor, sehingga naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar akan mempengaruhi harga. Realita di lapangan, harga pupuk lebih tinggi dari HET yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut diduga karena dalam penetapan HET kurang realistis, masih jauh dari perkembangan

tingkat harga di pasar dunia dan biaya transportasi selama distribusinya (Kariyasa *et al.*, 2004).

Untuk mengetahui penilaian responden terhadap perubahan harga pupuk selama 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 6. Hampir semua responden mengungkapkan selama 5 tahun terakhir harga pupuk cenderung naik. Harga pupuk pernah turun menjelang panen, dan saat itu petani tidak membutuhkan pupuk.

Besaran harga pupuk khususnya urea yang diharapkan responden sangat bervariasi. Namun demikian, sebagian besar responden mengungkapkan bila harga urea paling tinggi Rp1.050,-/kg mereka tidak akan mengalami kerugian. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blora, dalam kurun waktu 2002 - 2005 harga pupuk urea tidak pernah kurang dari Rp1.200,-/kg. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka sebagian besar responden mengalami kerugian dalam berusaha tani padi.

Tabel.6. Penilaian responden terhadap harga pupuk urea

Uraian	Frekuensi	persen
Responden	107	100
Penilaian petani terhadap harga pupuk 5 tahun terakhir (2000 – 2004)		
a. Cenderung naik	102	95,33
b. Cenderung turun	-	-
c. Cenderung tetap	-	-
d. Pernah turun	5	4,67
Harga pupuk urea agar tidak rugi (versi petani)		
a. Urea: \leq Rp1050/kg	49	45,79
b. Rp1.100–Rp1.200/kg	21	19,63
c. Rp1.200–Rp1.300/kg	12	11,21
d. Setara 1 kg gabah	25	23,36

Persepsi Petani terhadap Kebijakan Subsidi Pupuk

Pemerintah Indonesia terus menerus berusaha mendorong petani untuk meningkatkan produksi padi. Pemerintah memberikan subsidi berbagai faktor produksi, khususnya pupuk, benih, obat-obatan, dan memberikan kredit usahatani. Dalam hal ini alokasi subsidi pupuk memperoleh porsi terbesar dibanding subsidi yang lain untuk mendorong petani menggunakan pupuk. Subsidi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi padi, menstabilkan harga padi di tingkat petani, dan meningkatkan efisiensi transfer sumberdaya pemerintah kepada petani sebagai bagian dari program pembangunan pedesaan (Rusastra *et al.*, 2002 disitasi Darwis dan Nurmanaf, 2004). Pemerintah juga menerapkan harga eceran tertinggi berdasarkan pertimbangan biaya produksi, biaya distribusi, dan "fee" untuk pengecer. Harga eceran tertinggi ini dikaitkan dengan harga dasar padi dan beras. Oleh karena itu setiap kali pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi untuk pupuk, maka diikuti peningkatan harga dasar padi.

Pencabutan subsidi pupuk merupakan bagian dari perjanjian pemerintah Indonesia dengan IMF, diumumkan pada tanggal 2 Desember 1998. Pertimbangan lain dari kebijakan ini adalah agar industri pupuk lebih kompetitif dengan adanya pasar bebas serta meningkatkan jumlah importir pupuk. Pasca pencabutan subsidi pupuk, terdapat beberapa instrumen kebijakan pemerintah pada padi dan gabah, yaitu: harga dasar dan kredit ketahanan pangan, tarif impor, perbaikan infrastruktur publik, pemberdayaan petani, serta peningkatan

peran swasta dan pemerintah daerah (Suryana, 2003).

Pencabutan hubungan antara Indonesia dengan IMF memberikan peluang bagi pemerintah untuk kembali menerapkan subsidi pupuk. Sejak subsidi pupuk ini diterapkan, setiap tahun dilakukan penyesuaian harga. Kebijakan pemberlakuan subsidi pupuk bagi petani seharusnya sudah diketahui petani dan tercermin dari penurunan harga di tingkat petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua petani mengetahui tentang kebijakan pemberlakuan kembali subsidi pupuk (Tabel 7). Petani yang tidak mengetahui kebijakan ini cukup banyak (41,12%). Menurut responden, mereka mengetahui kebijakan subsidi pupuk terutama dari media massa (TV/koran) dan dari label pembungkus pupuk. Hanya sekitar 5,61% petani responden yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi tentang kebijakan subsidi dari petugas pertanian.

Peranan penyuluh sebagai sumber informasi tentang berbagai kebijakan strategis pemerintah perlu ditingkatkan, sesuai dengan kebijakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh pemerintah pada tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa 43,95% responden masih menganggap penyuluh sebagai petugas pertanian di lapangan sebagai pihak yang 'bertanggung jawab' terhadap kurang sampainya informasi tentang subsidi (Tabel 7). Menurut para petani, petugas pertanian seharusnya memberikan informasi lebih jelas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor pertanian.

Tabel 7. Persepsi terhadap kebijakan subsidi harga pupuk

Uraian	Frekuensi	persen
Responden	107	100
Informasi adanya kebijakan subsidi pupuk:		
a. Mengetahui, dari:	59	55,14
- Petugas pertanian	6	5,61
- TV/Koran	18	16,82
- Penjual pupuk	2	1,87
- Sesama petani anggota kelompok tani	2	1,87
- Label pada karung	19	17,76
- Gabungan jawaban a.	12	11,21
b. Tidak mengetahui	44	41,12
c. Mengetahui sedikit dan kurang jelas	4	3,74
Alasan pupuk bersubsidi kurang diketahui		
a. Kurang informasi dari petugas pertanian	47	43,95
b. Kesengajaan penjual pupuk	13	12,15
c. Jumlah pupuk sedikit	13	12,15
d. Jawaban gabungan	22	20,56
e. Tidak tahu	12	11,19

Ironisnya, ternyata sebagian besar petani menyatakan tidak menyadari atau tidak merasakan manfaat langsung dari pemberlakuan kebijakan subsidi pupuk tersebut (Tabel 8). Alasan yang dikemukakan adalah harga yang harus dibayar petani sama antara sebelum dan sesudah pemberlakuan kembali subsidi pupuk. Menurut Kariyasa *et al.*, (2004) pemberlakuan kembali subsidi pupuk sejak 2003 belum efektif, karena sering terjadi lonjak harga dan langka pasok di tingkat petani. Hanya sekitar 11,21% petani yang menyatakan bahwa harga pupuk menjadi lebih murah setelah pemberlakuan kembali subsidi pupuk.

Petani berpendapat bahwa agar pupuk

bersubsidi dapat dirasakan manfaatnya, maka petugas pertanian perlu memberikan informasi yang jelas kepada para petani (Tabel 9). Informasi ini diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam bernegosiasi dengan pedagang, untuk mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih murah. Selain itu, sebagian petani mengharapkan agar sistem distribusi pupuk bersubsidi diperbaiki dan secara rutin dikontrol untuk menghindari penyimpangan. Sesuai pendapat Kariyasa *et al.*, (2004), bahwa pendistribusian pupuk sebaiknya berdasarkan batas geografis, dan penunjukan penanggung jawab pendistribusian atas dasar pangsa pasar terbesar dari produsen pupuk.

Tabel 8. Manfaat yang dirasakan petani dengan adanya kebijakan pupuk bersubsidi

Uraian	Frekuensi	persen
Responden	107	100
a. Bermanfaat, alasannya:	19	17,75
- Harga pupuk lebih murah	1211,21	
- Mudah mendapatkan pupuk	3	2,80
- Gabungan jawaban a.	4	3,74
b. Tidak bermanfaat, alasannya:	80	74,77
- Harga sama dengan sebelum ada kebijakan	24	22,42
- Harga pupuk mahal	34	31,77
- Sulit mendapatkan pupuk	10	9,34
- Gabungan jawaban b.	12	11,21
c. Tidak tahu	8	7,48

Tabel 9. Upaya agar kebijakan pupuk bersubsidi dirasakan manfaatnya oleh petani

Uraian	Frekuensi	persen
Responden	107	100
a. Kontinuitas informasi petugas pertanian	26	24,30
b. Distribusi pupuk dikontrol	12	11,21
c. Harga pupuk dikontrol	1	0,93
d. Sangsi bagi penjual pupuk yang melanggar	-	-
e. Jumlah pupuk diperbanyak	2	1,87
f. Gabungan a – e	60	56,07
g. Tidak tahu	6	5,61

SIMPULAN

Penilaian responden terhadap harga pupuk selama 5 tahun terakhir cenderung naik, tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sekitar 41,12% responden tidak mengetahui kebijakan subsidi, dengan alasan harga yang dibayar sama dengan sebelum adanya kebijakan. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merupakan salah satu sumber informasi utama bagi petani, sehingga perlu penataan ulang tentang kelembagaan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M. O., K. Kariyasa, 2000. Perumusan Kebijakan Harga Gabah dan Pupuk Dalam Era Pasar Bebas. Laporan Bulanan Agustus 2000. Puslitbang Sosek Pertanian, Bogor.
- Anonim, 2003. Memorandum Administrasi Proyek Untuk Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi. Kerjasama Badan Litbang Pertanian dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2004. Jawa Tengah Dalam Angka 2004.

- , 2003. Sensus Pertanian 2003 Jawa Tengah. Hasil Pendaftaran Rumah Tangga.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2004. Blora Dalam Angka 2004.
- Bagyo, A. S., B. Rahmanto, 1995. Faktor Kelembagaan dan Sosial Ekonomi dalam Adopsi Sabit Gerigi dalam Usahatani Padi *dalam* Risalah Seminar Hasil Penelitian Sistem Usahatani dan Sosial Ekonomi Berbasis Tanaman Pangan, Bogor 4-5 Oktober 1994. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. Hlm 418-424.
- Collier, W.L., Santosa K., Soentono, Wibowo R., 1996. Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Pedesaan Di Jawa. Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Darwis V, A. R. Nurmanaf, 2004. Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. FAE, Volume 22, No. 1, Juli 2004. Hlm 63-73.
- Dillon, J.P., Hardakar. 1980. Farm Management Research For Small Farmer Development. FAO, Rome.
- Gatoet S. H., 2003. Simulasi Dampak Perubahan Faktor-faktor Ekonomi Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pertanian. Agro Ekonomi. PPSEP, Badan Litbang Pertanian, 21 (1): 1- 25.
- Hadi, P. U., Hendiarto, I W. Sudana, A. Pramono, I. Utomo., 1997. Analisis Kemampuan Petani Membeli Pupuk. Laporan Penelitian. Kerjasama antara PT. Petrokimia Gresik (Persero) dengan Puslit Sosek Pertanian.
- Hermawan, A. , Sarjana, A. Choliq 2006. Status dan Prospek Usaha Ternak di Lahan Kering Berlereng Kabupaten Temanggung. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Peternakan di Bidang Agribisnis untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Program Studi Sosial ekonomi Peternakan. Fakultas Peternakan, UNDIP. Semarang, 3 Agustus 2006.
- Hermawan, A., Abdul Choliq, Forita DA, Sarjana, Sumardi Suriatna, 2005. Kinerja Petani Gurem dalam Pembangunan Pertanian di Wilayah Miskin dan Upaya Pengembangannya. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah. Laporan Penelitian.
- Kariyasa, K., M. Maulana, S. Mardianto, 2004. Usulan Tingkat Subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Relevan serta Perbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian (Agricultural Policy Analysis). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Departemen Pertanian. 2 (3): 277-287.
- Maryadi, 2002. Nilai Tukar Petani Sebagai Indikator Tingkat Kesejahteraan Petani. Makalah dalam Lokakarya Pendekatan Analisis Kesejahteraan Petani. Ungaran, Desember 2002.
- Sinar Tani, 2004. Gejolak Pupuk Setelah Rayonisasi. Sinar Tani Edisi 4-10 Februari 2004.
- Steel, R.G.B, Torrie, J. H., 1981. Principles and Procedures of Statistics. A Biometrical Approach. 2nd Ed. International student Ed. Mc Graw-Hill International Book Company Sydney.
- Suryana, A. 2003. Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan *dalam* Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan. Edisi 2003/2004. BPFE, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.